



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UIT JBB

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ERWIN ANSORI**
2. Jabatan : **GENERAL MANAGER**
3. NHK : **195503**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 9.110.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/90 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.063.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXY MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA SCOTT GENIUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA IRONHORSE HARDTAIL Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, LAINNYA Rp. 480.000.000
6. LAINNYA, SEPEDA SPECIALIZED EBIKE Tahun 2018, HADIAH Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.199.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.444.749.687
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.816.749.687
III. HUTANG	Rp.	396.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.420.749.687

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.